

**PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 1948-1949**

Iqbal Oxy Ardiansyah, MRR Ratna Endang Widuatie, S.S., M.A.

E-mail: ardiansyahi37@yahoo.com

***Abstract :** This article analyzes descriptively and analytically the efforts and struggles of the army and the people in defending Indonesian independence in Lamongan Regency during the period of physical revolution (Dutch Military Aggression II). The problems examined in this paper include the struggle efforts carried out by the army and the people of Lamongan Regency such as the battle in the village of Kentong, the weaving event, the battle at the end of Jalan Ploso Boden, the battle in Kedungpring, the battle in Gumantuk, and the battle in the Field of Palang Village. The author studies it by using a psychological approach, while the theory of aggression is used by the author as a surgical tool. The method used in this study is a historical method according to Louis Gottschalk, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The struggle of the army and the people in maintaining Indonesian independence in Lamongan District was very large and had an important role for the following periods, until finally on December 19, 1949, the transfer of power from the Dutch government to the government of the Republic of Indonesia was held. Since the transfer of power, all Dutch troops in the Lamongan Regency began to withdraw and gradually left the region. The impact was that many republican soldiers and residents had died in battle, and many residences were damaged by the burning of Dutch troops.*

***Keywords :** Struggle, Independence, Lamongan Regency.*

Abstrak : Artikel ini mengkaji secara deskriptif analitis usaha-usaha dan perjuangan yang dilakukan tentara dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan selama revolusi fisik. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini mencakup usaha-usaha perjuangan yang dilakukan tentara dan rakyat Kabupaten Lamongan seperti pertempuran di Desa Kentong, peristiwa Kakat Penjalin, pertempuran di ujung Jalan Desa Ploso Boden, pertempuran Kedungpring, pertempuran

Gumantuk, dan pertempuran di Lapangan Desa Palang. Penulis mengkajinya dengan menggunakan pendekatan psikologi, sedangkan teori agresi digunakan sebagai alat bedahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah menurut Louis Gottschalk yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perjuangan tentara dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan sangatlah besar dan memiliki peran yang penting, hingga akhirnya pada tanggal 19 Desember 1949 diadakanlah penyerahan kekuasaan militer dari pihak Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Semenjak penyerahan kekuasaan tersebut, seluruh pasukan Belanda yang berada di Kabupaten Lamongan mulai ditarik mundur dan meninggalkan wilayah tersebut secara bertahap. Dampak yang ditimbulkan setelah masa revolusi fisik di Kabupaten Lamongan diantaranya ialah banyaknya tentara yang gugur dan penduduk yang terbunuh, serta banyak tempat tinggal yang rusak akibat dibakar pasukan Belanda.

Kata kunci: Perjuangan, Kemerdekaan, Kabupaten Lamongan.

1. Pendahuluan

Membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berarti membahas suatu periode atau masa yang telah berlangsung di Indonesia, yakni masa perang kemerdekaan atau masa revolusi fisik (1945-1949). Bermula dari kekalahan pasukan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, menimbulkan suatu kondisi kekosongan kekuasaan politik di wilayah-wilayah Indonesia (Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia–Angkatan Darat, 1972). Momen tersebut ditangkap oleh golongan muda untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadapan beberapa rakyat Indonesia yang berkumpul di luar rumahnya (Jalan Pegangsaan Timur No.56, Jakarta), Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (Ricklefs, 2008). Selesai Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ketikan Sayuti Melik, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih jahitan Fatmawati oleh Latif Hendraningrat, Suhud, dan Tri Murti, dengan diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia (Chambali, 2006). Dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, menandakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia secara resmi telah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan di tanah airnya. Suatu hari yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, suatu hari yang menjadi titik balik perubahan kondisi dan keadaan mereka di tanah kelahirannya, suatu hari yang membuat mereka bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan yang telah mereka rasakan selama ini.

Pihak Belanda yang telah mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia, merasa bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah jajahannya dan mengklaim untuk segera diserahkan kepada pihak Belanda. Pihak Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, dengan tergesa-gesa merencanakan kedatangannya ke wilayah Indonesia, dengan maksud menerima penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang, yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan juga baru merasakan kebebasannya dari segala bentuk penjajahan, langsung mengambil sikap menentang dan melawan rencana pihak Sekutu untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Belanda. Perang antara kedua belah pihak tidak dapat terhindarkan, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat Indonesia dalam

melawan Sekutu di daerah-daerah Indonesia, seperti Pertempuran 10 November di Surabaya (1945), Palagan Ambarawa di Ambarawa (1945), Bandung Lautan Api di Bandung (1946) dan lain sebagainya. Masa ini dikenal sebagai masa “perang kemerdekaan” atau masa “revolusi fisik” (1945-1949) (Prabowo, 2009).

Pada masa revolusi fisik, tidak hanya tentara yang memiliki peran besar dalam bertempur dan melawan musuh, melainkan rakyat juga ikut tampil di garis terdepan dalam mengusir para penjajah. Perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan dan memberikan bukti yang jelas dan tegas bagaimana bangsa Indonesia menginginkan dan mencintai kemerdekaannya. Betapa besar kebencian rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang telah mereka rasakan selama ini. Perang kemerdekaan terjadi bukan hanya perang militer semata, tetapi telah menjadi perang rakyat secara menyeluruh. Perang ini sangatlah jelas bersifat kedaerahan, karena setiap daerah menjalankan perang dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, walaupun dalam lingkup yang lebih luas daripada perang pada masa kerajaan terdahulu. Setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan pasti melahirkan suatu cerita kepahlawanan yang menjadi kebanggaan bagi daerah tersebut, termasuk di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki beberapa cerita-cerita kepahlawanan pada masa revolusi fisik, seperti pertempuran Kadet Soewoko, pertempuran Sugeng Suprobo, pertempuran Batalyon Mayangkara, pertempuran Batalyon Sunaryadi, dan lain sebagainya. Perasaan senasib dan seperjuangan antar rakyat, telah menambah rasa kepercayaan yang kuat dan erat dalam pemupukan jiwa persatuan dan semangat juang dalam perjuangan melawan musuh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kajian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kepentingan dan tujuan pasukan Belanda dalam menyerang dan menguasai Kabupaten Lamongan pada masa Agresi Militer Belanda II. (2) Guna menjelaskan secara deskriptif analitis usaha-usaha yang dilakukan tentara dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan selama revolusi fisik. (3) Untuk mengetahui akhir perjuangan tentara dan rakyat dalam menghadapi pasukan Belanda selama masa revolusi fisik di Kabupaten Lamongan. Ruang lingkup tulisan ini terdiri atas ruang lingkup spasial dan temporal. Lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun ruang lingkup temporal difokuskan pada tahun 1948-1949. Lingkup

temporal diambil penulis guna memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, diawali dari tahun 1948 atau saat pasukan Belanda mulai menjalankan rencana Agresi Militer Belanda II (18 Desember 1948) ke seluruh wilayah RI yang tersisa untuk dikuasai pasukan Belanda. Disusul dengan terjadinya pertempuran-pertempuran di daerah-daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda. Batas akhir lingkup temporal dalam skripsi ini adalah pada tahun 1949, dikarenakan penyerahan kedaulatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, adalah pada tanggal 27 Desember 1949. Disahkannya kedaulatan kemerdekaan Indonesia, menandakan berakhirnya perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya melawan pasukan Belanda selama masa Agresi Militer Belanda II di wilayah-wilayah Indonesia. Rentang waktu 1948-1949, telah terjadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di Kabupaten Lamongan, dalam memperjuangkan kebebasannya dari segala bentuk penjajahan bangsa asing dan melibatkan seluruh elemen. Skripsi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948-1949, bertujuan menjelaskan segala upaya-upaya yang dilakukan, baik tentara maupun rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan dari para musuh yang ingin merebutnya antara tahun 1948 hingga tahun 1949 (masa Agresi Militer Belanda II).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948-1949 adalah metode sejarah menurut Louis Gottschalk. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975). Metode sejarah ini dibagi menjadi empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah sebagai berikut: 1) Pengumpulan sumber (heuristik), 2) Kritik sumber (kritik intern dan ekstern), 3) Penafsiran sumber (interpretasi), 4) Penulisan sejarah (historiografi).

Heuristik merupakan tahapan yang berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dan relevan dengan tulisan penulis. Sumber-sumber sejarah dikategorikan menjadi dua, yakni; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber pertama

yang berupa tulisan-tulisan atau sumber lisan dari pelaku asli peristiwa tersebut. Sumber-sumber primer didapatkan penulis dari perpustakaan dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Lamongan, Kodim 0812 Lamongan, Museum Brawijaya, badan kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Timur, perpustakaan pusat sejarah TNI, ANRI dan lain sebagainya. Selain sumber primer, skripsi ini juga menggunakan sumber sekunder atau sumber kedua sebagai pendukung sumber primer. Sumber sekunder diperoleh dari masyarakat yang mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah atau pertempuran-pertempuran yang terjadi pada masa revolusi fisik di Kabupaten Lamongan tidak secara langsung. Metode yang dipakai penulis dalam mendapatkan sumber sekunder adalah dengan melalui wawancara.

Kritik sumber adalah tahapan yang dilakukan penulis untuk memilah sumber-sumber yang telah diperoleh, dengan mengkaji otentisitas (kritik internal) dan kredibilitas (kritik eksternal) dengan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul, untuk dijadikan referensi tulisan. Kritik eksternal dilakukan penulis pada tahun terbit buku dan kondisi zaman ketika penulisan buku tersebut, dengan melakukan kroscek antar sumber, sehingga kredibilitas buku dapat diketahui oleh penulis. Kritik sumber juga dilakukan pada sumber-sumber lisan, karena sangat rentan menimbulkan subjektivitas sejarah. Kedekatan antara narasumber dengan pelaku sejarah atau salah seorang pejuang dapat menyebabkan perbedaan alur kisah sejarah, sehingga perlu adanya kritik sumber kepada narasumber, dengan cara menkroscek kesaksian atau cerita peristiwa sejarah antara narasumber satu dengan narasumber lainnya.

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang diambil dari data atau sumber yang telah valid. Fakta-fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi suatu peristiwa yang utuh tanpa adanya unsur subjektivitas dalam penulisan sejarah dan mendekati kebenaran. Tahap interpretasi ini, penulis menggunakan ilmu bantu, yakni ilmu psikologi, dengan dibantu teori agresi, sehingga segala aktifitas dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan selama masa revolusi fisik, dapat diungkapkan secara kronologis dan akademis. Tahap interpretasi dilakukan penulis dengan berbagai model, yaitu seleksi yang mengungkap relevan atau tidaknya sumber yang digunakan, kemudian mengurutkan dan merangkai fakta-fakta sejarah, menkronologisasi, dan mengimajinasi dari seluruh sumber-sumber

yang telah ditemukan penulis terkait dengan penulisan skripsi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Lamongan tahun 1948-1949.

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan kajian sejarah. Historiografi diartikan sebagai penyusunan dan penulisan kembali hasil interpretasi, dengan cara merangkaikan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh kedalam sintesis sejarah. Tahapan historiografi, karya tulis ilmiah menjadi lebih deskriptif analitis, sesuai dengan metodologi penulisan kajian ilmu sejarah yang disusun secara kronologis. Penyusunan historiografi skripsi ini berdasarkan pada pertanyaan 5 W + 1 H (What, Who, When, Why, Where dan How), agar dapat dipaparkan secara detail dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan kajian ilmu sejarah. Tahapan terakhir dalam penulisan kajian ilmu sejarah, penulis harus dapat merekonstruksi semua peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi menjadi tulisan sejarah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kabupaten Lamongan Menuju Kemerdekaan Indonesia

Pada hari Jumat tertanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, Sukarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadapan para anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan beberapa pemuda yang datang ke rumahnya. Rencana awal, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Lapangan Ikada, tetapi tiba-tiba dipindah ke Halaman Rumah Sukarno (Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta), dikarenakan Lapangan Ikada telah dijaga ketat oleh pasukan artileri Jepang (Soejono dan Leirissa, 2010). Setelah Hatta tiba di kediaman Sukarno, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dimulai dengan sederhana, Sukarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Peran pemuda saat itu sangatlah vital, karena para pemuda adalah yang bergerak untuk menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia, baik melalui *graffiti action* di gerbong-gerbong kereta api atau trem, memuat berita kemerdekaan Indonesia di surat kabar, siaran radio, dan lain-lain.

Pada siang hari, berita mengenai kemerdekaan Indonesia telah tersebar hingga ke Surabaya dan Jogjakarta, di Surabaya, para pejuang yang berprofesi sebagai wartawan, menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Kota

Surabaya melalui surat kabar dan siaran radio (El-Kayyis, 2015). Kondisi berbeda terlihat di Karesidenan Bojonegoro (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban) yang berdekatan dengan Kota Surabaya, pada hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, kondisinya begitu tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan tidak mengandung arti yang luar biasa (Sudarmo, dkk, 1993). Kondisi yang begitu tenang di Karesidenan Bojonegoro, dikarenakan pihak Jepang yang masih berkuasa di Karesidenan Bojonegoro berhasil menutup rapat-rapat informasi kemerdekaan Indonesia yang masuk dari luar daerah, karena masih sedikit orang yang mendengar informasi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga berita kemerdekaan Indonesia belum dapat disiarkan secara luas dan merata di Karesidenan Bojonegoro, selain itu, pemerintah Jepang di Karesidenan Bojonegoro masih cukup kuat (Suryadi, 1985). Pada tanggal 18 Agustus 1945, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai tersebar kepada khalayak umum, setelah surat-surat kabar memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan huruf-huruf yang besar.

Pasca Kota Surabaya memproklamasikan diri berpihak kepada pemerintahan RI, golongan pemuda di Karesidenan Bojonegoro dengan tegas mendesak KNID (dari tingkat kecamatan hingga karesidenan) dan Residen Bojonegoro agar bendera merah putih segera dikibarkan di seluruh wilayah Karesidenan Bojonegoro, baik di kantor-kantor pemerintahan, gedung-gedung strategis, dan lain-lain. Desakan para pemuda yang semakin besar dan keras membuat KNID Karesidenan Bojonegoro segera bertindak dengan memerintahkan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Karesidenan Bojonegoro. Pasca surat perintah dari KNID Karesidenan Bojonegoro turun, berkibarlah bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan Karesidenan Bojonegoro, namun karena pemerintah Jepang masih cukup kuat berkuasa di Karesidenan Bojonegoro, sehingga bendera merah putih dikibarkan bersamaan dengan bendera *Hinomaru* (nama bendera Jepang). Tindakan para pejabat pemerintahan di Karesidenan Bojonegoro sangat disesalkan oleh para pemuda. Sehingga mereka melakukan aksi atau gerakan dengan mengecat dan menempelkan sticker bergambar bendera merah putih pada rumah-rumah dan kendaraan-kendaraan yang mereka jumpai, mereka juga memberi tanda “milik Republik Indonesia” dikendaraan-kendaraan pemimpin dan pegawai-pegawai berkebangsaan Jepang. Pada tanggal 14 September 1945, pemerintah Jepang di Karesidenan Bojonegoro menolak untuk mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia,

yang membuat rakyat tidak berani untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya (Gunawan dan Ohorella, 2001).

Penolakan pemerintah Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperkuat dengan disebarluaskannya berita tersebut oleh *Shuchokan* (Residen) Karesidenan Bojonegoro, Raden Mas Tumenggung Ario (R.M.T.A.) Suryo ke tiga daerah kekuasaannya, yakni Kabupaten Lamongan pada tanggal 16 September 1945, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 September 1945 dan Kabupaten Tuban pada tanggal 19 September 1945 (Sudarmo, dkk, 1993). Penolakan pemerintah Jepang terhadap kemerdekaan RI menyebabkan perdebatan antara pihak pejuang RI dan KNID Karesidenan Bojonegoro, sehingga pada tanggal 22 September 1945, KNID Karesidenan Bojonegoro mengadakan rapat. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh utusan KNID kabupaten, termasuk perwakilan KNID Kabupaten Lamongan, setelah berunding hingga larut malam, dipelopori oleh utusan KNID Kabupaten Lamongan, Mr. Budisusetio mengusulkan kepada peserta rapat untuk memutuskan mosi tidak percaya kepada pimpinan Karesidenan Bojonegoro (Residen Suryo) dan seluruh kepala daerah dipecat dari jabatannya. Pada tanggal 24 September 1945 pagi hari, ratusan pemuda Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI), membanjiri halaman Rumah Residen Bojonegoro R.M.T.A. Suryo. Aksi dari golongan pemuda tersebut, bertujuan guna mendesak Residen R.M.T.A. Suryo untuk menandatangani naskah proklamasi berdirinya Pemerintah RI Daerah Karesidenan Bojonegoro yang telah disiapkan KNID Karesidenan Bojonegoro (Sjamsudduha, 1994).

Pasca permintaan dari KNID Karesidenan Bojonegoro kepada Residen Suryo disetujui, KNID Karesidenan Bojonegoro segera menyelenggarakan rapat raksasa di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Situasi di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sangatlah gegap gempita dalam menyambut kemerdekaan Indonesia di Karesidenan Bojonegoro. Lagu-lagu perjuangan berkumandang dengan kerasnya, seperti di Timur matahari mulai bercahaya, sorak-sorak bergembira, dari Barat sampai ke Timur, dan lain-lain. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di Karesidenan Bojonegoro, disaksikan oleh pegawai-pegawai berkebangsaan Jepang yang melihat dari kejauhan. Setelah dilaksanakannya penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak RI, walaupun dengan paksaan dan kekerasan, selanjutnya dilakukan pelucutan senjata tentara-tentara Jepang dan *Kempeitai* atau *Kenpeitai* (satuan polisi militer Jepang yang ditempatkan di

seluruh wilayah Jepang dan daerah jajahannya) oleh pejuang RI. Segera setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan “proklamasi khusus” Karesidenan Bojonegoro dikumandangkan oleh Residen Bojonegoro R.M.T.A. Suryo, tanggung jawab rakyat Lamongan (khususnya para pemudanya), dituntut untuk mempertahankan dan membela kemerdekaan Republik Indonesia di wilayahnya dengan segenap jiwa raganya.

3.2 Pergerakan Belanda Pasca Kemerdekaan di Kabupaten Lamongan

Kemerdekaan Indonesia telah di proklamirkan, namun bangsa Indonesia masih mengalami berbagai macam rongrongan atau gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Kedatangan NICA yang dibonceng AFNEI Inggris disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh rakyat Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menempuh dengan menggunakan dua skema, yakni perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Perjuangan diplomasi melahirkan beberapa perjanjian, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville dan lain sebagainya. Sedangkan perjuangan bersenjata menciptakan berbagai pertempuran heroik, seperti pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Medan Area di Sumatera Utara, Bandung Lautan Api di Bandung dan lain-lain.

Berakhirnya peristiwa 10 November di Kota Surabaya, Inggris (AFNEI Inggris) dan Belanda (NICA) menyakini bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan RI telah mendapat dukungan penuh oleh seluruh rakyat, pemerintah dan tentara Indonesia. Sehingga demi memelihara perdamaian, pihak Inggris mendesak agar dicapainya kesepakatan antara pemerintah RI dan Belanda sebelum mereka meninggalkan wilayah RI. Pemerintah RI Pusat menyadari bahwa pertempuran-pertempuran yang dihadapi hanya menunjukkan kepada dunia akan kelemahan RI dalam hal kekuatan.

Persenjataan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bangsa Indonesia belumlah cukup dan siap guna mengusir musuh dengan perjuangan bersenjata. Sehingga pemerintah RI lebih memilih menggunakan jalur perundingan-perundingan atau diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan negara, namun jalur diplomasi masih mengalami kesulitan, bahkan sering kali perundingan yang dilakukan lebih menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak RI. Tentara dan rakyat lebih memilih melalui jalur perjuangan bersenjata dengan menghadapi langsung musuh dimedan pertempuran, guna mengusir para penjajah dari wilayah RI dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentara dan rakyat mulai menyusun kembali

kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi serangan-serangan musuh yang berusaha menjajah kembali wilayah- wilayah RI, termasuk di Kabupaten Lamongan. Pada tanggal 18 Januari 1949, Kota Lamongan mulai terancam oleh serbuan pasukan Belanda yang mulai bergerak dari arah Selatan, namun serdadu-serdadu Belanda mendapatkan perlawanan yang begitu gigih dari gabungan pasukan satuan teritorial Kota Lamongan, yang berusaha mencoba mempertahankan Kota Lamongan dari penguasaan pasukan Belanda, namun karena kekuatan pasukan Belanda yang didukung dengan persenjataan yang canggih dan lebih lengkap, membuat para pejuang republik di Kota Lamongan terpaksa mundur dan menyebar ke basis pertahanannya masing- masing.

Pada pukul 13.00 WIB Kota Lamongan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda, namun sebelum meninggalkan Kota Lamongan, para pejuang terlebih dahulu membumihanguskan bangunan-bangunan penting dan gedung-gedung strategis, seperti Rumah Dinas Bupati Lamongan di Kampung Bandung, Rumah Penjara di Selatan Alun-alun Lamongan, Pegadaian, dan lain-lain, sehingga tidak dapat digunakan oleh serdadu-serdadu Belanda. Peristiwa pembumihangusan Kota Lamongan dikenal dengan sebutan “Lamongan Lautan Api” dan masuk kedalam laporan Komisi Tiga Negara (KTN) yang ditandatangani oleh Harrimans (Wakil dari Belgia) dan Chritchley (Wakil dari Australia), lalu dikirimkan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), selain itu, Lamongan lautan api juga dimuat dalam koran berbahasa Belanda, *Het Vrije Volk* (Sjamsudduha, 1994). Penyerbuan pasukan Belanda tak mungkin ditahan, paling banyak hanya dapat diperlambat dengan gangguan serta bumi hangus guna memperoleh waktu dan ruang sebanyak mungkin untuk pengungsian pasukan- pasukan, alat-alat, pegawai-pegawai dan rakyat ke kantong-kantong pedalaman. Pokok perlawanan TNI ialah perang gerilya, yang disatu pihak bersifat agresif terhadap musuh dan dilain pihak bersifat konstruktif dalam menegakkan kekuasaan *de facto* RI, dalam arti militer maupun sipil (Prabowo, 2009).

Kota Lamongan, membuat pemerintahan di Kabupaten Lamongan harus mengungsi ke luar Kota Lamongan, sedangkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dilakukan di desa- desa yang dijadikan sebagai tempat pemerintahan darurat, seperti misalnya di Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng. Setelah Kota Lamongan dikuasai pasukan Belanda, kecamatan-kecamatan di lingkup wilayah administratif Kabupaten Lamongan pun secara bertahap ikut jatuh ke tangan pasukan Belanda. Perangkat dan pejabat pemerintahan beserta kantor-kantornya, baik di tingkat kawedanan hingga

kecamatan juga ikut mengungsi ke desa- desa yang dirasa aman dari serangan pasukan Belanda. Akhir bulan Februari 1949, pasukan RI yang termasuk didalamnya mereka yang bekerja di pemerintahan sipil dan pamong desa serta rakyat Lamongan betul-betul menghadapi ujian terberat, ujian lahir batin bagi kesetiaan mereka kepada bangsa, proklamasi kemerdekaan dan Negara Republik Indonesia Serbuan serdadu- serdadu Belanda yang begitu cepat dan dalam waktu hanya sekitar 3-4 hari sudah dapat masuk dan menusuk jantung pertahanan TNI, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap serangan yang dilakukan serdadu-serdadu Belanda telah diperhitungkan dengan begitu cermat dan matang.

Dukungan perlengkapan dan peralatan persenjataan yang lebih modern dan lengkap, serta dibantu dengan serangan-serangan udara guna memperlancar pergerakan pasukan Belanda dalam menguasai suatu daerah. Sebaliknya, yang dialami oleh para pejuang RI, sekali musuh memberi pukulan sudah langsung menusuk jantung pertahanan tanpa adanya serangan balasan, dan kemudian mengoyak- ngoyak wilayah yang dilaluinya serta mencerai- beraikan pasukan yang coba menghadangnya. Pasukan republik hanya sanggup menghambat atau hanya sekedar mengganggu laju pergerakan serdadu-serdadu Belanda saja. Serbuan yang dilakukan Belanda ternyata tidak mampu menghancurkan TNI, bersama rakyat Indonesia mereka tetap melanjutkan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bergerilya melawan musuh. Memang, bilamana dilihat dari luar, seakan- akan tampak pemerintah dan TNI telah tamat riwayatnya, tetapi dalam kenyataannya, RI tetap ada dan terus berjalan walaupun harus terseok- seok, semboyan tritunggal manunggal yang dilakukan pemerintah darurat RI, TNI dan rakyat Indonesia telah membuktikannya pada masa-masa kritis Republik Indonesia.

3.3 Revolusi Fisik di Kabupaten Lamongan Tahun 1948-1949

Kabupaten Lamongan yang berhasil selamat dari serangan pasukan Belanda pada perang kemerdekaan I atau saat Agresi Militer Belanda I dan tidak sampai dikuasai oleh serdadu-serdadu Belanda, namun pada serangan pasukan Belanda ke II, Kabupaten Lamongan harus menerima pil pahit karena TNI berhasil dikalahkan dan seluruh rakyat Lamongan yang tidak patuh kepada Belanda terusir dari rumahnya. Pada tanggal 18 Januari 1949, pukul 13.00 WIB, Kota Lamongan berhasil diduduki dan dikuasai oleh serdadu-serdadu Belanda, setelah melawan TNI, rakyat dan para pejuang RI lainnya

yang secara heroik dan patriotik mempertahankan Kota Lamongan dari penjajahan pasukan Belanda (Suryadi, 1985). Pada bulan Maret 1949, terbentuk suatu sistem pemerintahan yang mengambil alih pemerintahan sipil dalam menghadapi pasukan Belanda yang bernama, pemerintahan militer Kabupaten Lamongan. Sejak terbentuknya pemerintahan militer Kabupaten Lamongan, bentuk pertahanan dan penyerangan yang digunakan pasukan RI mulai berubah dan beralih dari “*Passief Defensief*” menjadi “*Actief Offensief*”, yang mulanya pasukan RI hanya bertahan dan bersembunyi jika bertempur melawan pasukan Belanda berubah menjadi aktif melakukan penyerangan secara terbuka kepada serdadu-serdadu dan pos pertahanan pasukan Belanda. Salah satu bentuk perwujudan perubahan tersebut adalah keberhasilan pasukan RI mengadakan serangan umum ke Kota Lamongan yang telah dikuasai pasukan Belanda (Husain, 2016).

Serangan umum yang dilakukan pada hari Senin hingga hari Selasa, tanggal 28-29 Maret 1949, dengan menerjunkan seluruh pasukan tamtama dan pasukan candrabirawa KDM Lamongan yang berasal dari anggota-anggota ODM dipadukan dengan para pemuda dan rakyat desa yang siap berjuang membela kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan, dengan dibawah komando langsung Kapten Sukarsono berhasil masuk dan menyerang Kota Lamongan. Serangan umum ke Kota Lamongan juga mengartikan bahwa pemerintahan RI, baik dari kalangan tentara, bupati, lurah dan rakyat di Kabupaten Lamongan sepakat menjalankan gerakan non-kooperasi terhadap pemerintahan bentukan Belanda. Keberhasilan dilaksanakannya serangan umum ke Kota Lamongan, membuat grafik perjuangan kaum *republikein* mulai menunjukkan kenaikan, dengan munculnya peristiwa-peristiwa heroik dan dramatis dalam mengusir penjajah yang dilakukan oleh para pejuang RI di Kabupaten Lamongan, sekaligus menguji kesetiaan, kekuatan dan semangat juang para gerilyawan.

Salah satu batalyon yang berkuasa atau bertugas menjaga dan melindungi Kota Lamongan adalah Batalyon Sunaryadi (bersandikan SNYD). Batalyon Sunaryadi adalah sebuah pasukan tentara milik TNI yang terlatih secara militer dan ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan, terkhusus Kota Lamongan, dari penjajahan musuh (Belanda) yang ingin menguasai kembali wilayah-wilayah RI. Batalyon Sunaryadi harus menerima pil pahit, karena perjuangannya selama ini mempertahankan Kota Lamongan harus berakhir pada tanggal 18 Januari 1949 pukul 13.00 WIB, karena pasukan Belanda berhasil masuk dan menguasai secara penuh

Kota Lamongan. Selain Batalyon Sunaryadi yang beroperasi dan bertugas di Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan juga memiliki pasukan (batalyon) lainnya yang turut berkontribusi besar selama masa revolusi fisik, batalyon tersebut adalah Batalyon Mayangkara. Batalyon Mayangkara menjadi pasukan pertama Republik Indonesia yang masuk ke Kota Surabaya yang telah menjadi wilayah pasukan Belanda pasca perjanjian Renville.

Tentara sebagai kekuatan militer resmi RI, terdapat juga rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam badan-badan perjuangan dan kelaskaran, berusaha menemukan identitas jati dirinya sendiri untuk dapat memberikan imbalan kepada TNI dalam membangun kekuatan militer RI. Keanggotaan pada badan-badan perjuangan adalah sukarela (*voluntary organization*), yang mempunyai suatu bagian atau seksi yang dipersenjatai yang biasanya disebut laskar. Kewajiban dan tanggung jawab laskar-laskar rakyat di Indonesia ialah membantu tentara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik sebagai pasukan yang bertempur di garis depan, pasukan cadangan, ataupun pasukan bantuan lainnya guna memperlancar dan memenangkan pertempuran melawan musuh. Kelaskaran rakyat di Indonesia adalah berupa barisan tani, buruh dan pemuda kampung, yang memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan kampungnya, desanya, pabrik, kantor, bahkan hingga sawahnya sendiri dari segala bentuk serangan dan penjajahan pihak luar (Pramono, *et.all.*, 1983). Mereka juga mendapat tugas sebagai barisan penggempur, pasukan cadangan atau bantuan militer lainnya, disamping TNI yang merupakan pasukan utama militer RI. Barisan-barisan rakyat seperti kelaskaran Hisbullah, kelaskaran Sabilillah, pasukan pelajar, angkatan muda Indonesia (AMI), Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan lain-lainnya, yang bergerak secara terstruktur dan terorganisir sehingga mempunyai corak tersendiri sebagai tentara cadangan atau bantuan militer disamping TNI, dapatlah dinamakan sebagai laskar-laskar rakyat istimewa. Salah seorang komandan kelaskaran Hisbullah dan Sabilillah di Kabupaten Lamongan yang terkenal memiliki peran besar dalam perjuangan membela bangsa Indonesia di Pesisir Utara Kabupaten Lamongan selama revolusi fisik adalah seorang ulama bernama Kyai Haji Mohammad Amin Mustofa.

Pasca pertempuran di Kota Lamongan dan jatuhnya Kota Lamongan ke tangan serdadu-serdadu Belanda, Batalyon Sunaryadi melakukan *winggate* ke pedalaman Kabupaten Surabaya. Pada pukul 04.30 dini hari, pasukan Belanda melalui mata-matanya

(seorang prajurit bernama Subroto) mengetahui keberadaan Batalyon SNYD, mereka langsung mengepung sebuah rumah yang diindikasikan sebagai tempat bermalamnya Batalyon Sunaryadi, rumah tersebut segera ditembaki dari luar dan diserbu secara beramai-ramai (Suryadi, 1985). Akibat serangan kejutan serdadu-serdadu Belanda, membuat seluruh anggota Batalyon Sunaryadi langsung lari tunggang langgang tanpa sempat melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda. Melihat situasi di daerah Lamongan, Komandan Brigade XXX/Ronggolawe, Letkol Sudirman tidak tinggal diam saja dan ikut berpartisipasi dengan memerintahkan Seksi I Nurcahyo dan Seksi II Ronggodihar untuk mengadakan dan meningkatkan penghadangan- penghadangan terhadap iring-iringan dan patroli-patroli pasukan Belanda disekitar hutan daerah Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Seksi II Ronggodihar berhasil melaksanakan tugasnya dan berhasil, namun Seksi I Nurcahyo harus menyerah dan bergerak mundur setelah mendapat serangan kejutan dari pasukan Belanda. Melihat keberhasilan TNI (Seksi II Ronggodihar) dalam melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap patroli Belanda di Hutan Gunung Girik, Kecamatan Ngimbang, pasukan polisi Karesidenan Bojonegoro yang tergabung kedalam Kesatuan Mobbile Brigade (Mobrig) dibawah komando Komandan Kompi Aipda (Ajun Inspektur Polisi Dua) Suharsono, berinisiatif untuk melakukan hal yang sama di Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, namun dalam perjalanannya mereka kalah bertempur melawan serdadu-serdadu Belanda.

Sisa pasukan Batalyon Sunaryadi pun memilih untuk terus bertempur melawan pasukan Belanda di kantong-kantong gerilya. Pada bulan Februari 1949 pukul 06.30 WIB, di Desa Plosobuden, Kecamatan Deket, Seksi I yang dipimpin Letnan Muntalib dari Kompi Kardomo Batalyon Sunaryadi menerima laporan dari para pemuda desa, bahwa ada sepasukan tentara Belanda mulai mendekat ke Desa Plosobuden dari arah Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Surabaya, pertempuran berlangsung dan dimenangkan pasukan republik (Sjamsudduha, 1994). Sejak terbentuknya pemerintahan militer Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 1949, grafik perjuangan pasukan republik di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan kenaikan, dengan munculnya peristiwa-peristiwa heroik dan dramatis dalam mengusir penjajah yang dilakukan para pejuang RI di Kabupaten Lamongan, seperti pertempuran di Desa Gumantuk Regu I Kadet Suwoko pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, pertempuran di Lapangan Desa Palang

Regu VI Sersan Nurali pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, dan pertempuran-pertempuran para pejuang RI lainnya di Kabupaten Lamongan pada masa revolusi fisik (Tim Penyusun Naskah Buku, 1992). Walaupun dalam setiap pertempurannya pasukan republik berhasil dikalahkan dan dipukul mundur oleh pasukan Belanda yang terlatih dan telah berpengalaman dalam pertempuran serta dibantu dengan persenjataan yang lebih lengkap dan canggih.

3.4 Akhir Revolusi Fisik di Kabupaten Lamongan dan Dampaknya

Pasca diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Negara Belanda pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949, pemerintah RI yang diwakili oleh Moh. Hatta, sangatlah mendominasi perundingan (Ricklefs, 2008). Dalam perundingan di Den Haag, dapat dikatakan bahwa kemenangan berada ditangan perwakilan-perwakilan RI, sebab dalam perundingan tersebut, kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional. Pada bulan September 1949, UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia*), suatu badan perdamaian yang bertugas untuk menyelesaikan dan mendamaikan konflik antara Negara Indonesia dan Negara Belanda (pengganti KTN), membentuk suatu badan atau komite yang tingkatnya lokal untuk mengawasi dan bertanggung jawab dalam penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia di tingkat daerah-daerah RI, yang diberinama LJC (*Local Joint Committee*). Pada pertengahan bulan September 1949, dibentuklah LJC 12 yang bertugas di Karesidenan Bojonegoro, dengan diketuai pihak Belanda Letkol Rikkers dan dari Indonesia Mayor Rukminto, wakil Komisaris II Polisi Karnadi, anggota Mayor Basuki Rahmat, penasihat Mr. Tandiono Manu dan Mr. Suryadi. Kabupaten Lamongan secara resmi mendirikan sub-sub LJC 12 di daerah Kota Lamongan, Kecamatan Babat dan Kecamatan Paciran pada tanggal 21 Oktober 1949 yang diketuai R. Supardan. Pengangkatan R. Supardan sebagai ketua sub-sub LJC 12 di Kabupaten Lamongan menyebabkan kekosongan jabatan sebagai Bupati Lamongan, sehingga pada tanggal 18 Desember 1949 Patih Bojonegoro Kusno Suroatmojo dilantik sebagai Bupati Lamongan oleh Bupati Federal Susilo Tondoamijoyo (Sjamsudduha, 1994). Pada tanggal 19 Desember 1949, diadakanlah penyerahan kekuasaan militer dari pihak pemerintah Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia (Suryadi, 1985). Diterimanya kekuasaan wilayah RI dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia tersebut, menandakan secara resmi berakhirnya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia

yang disebut sebagai masa perang kemerdekaan atau revolusi fisik. Pada tanggal tersebut, secara serentak kabupaten-kabupaten di Karesidenan Bojonegoro melakukan serah terima kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia, setelah penyerahan kekuasaan Kota Bojonegoro dari Komandan Vak VIII/Belanda Letkol Ridders kepada Komandan Brigade Ronggolawe Letkol Sudirman, dilanjutkan di Kabupaten Lamongan yang diserahkan Kapten Van den Bergh kepada Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Lamongan Kapten Sukarsono.

Sejak diserahkannya kekuasaan militer dari pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, pasukan Belanda yang berada di Kabupaten Lamongan mulai ditarik mundur dan meninggalkan pos-pos mereka. Selama enam bulan pertempuran melawan pasukan Belanda, menurut catatan KDM Kabupaten Lamongan bagian penyiaran, korban dari pihak tentara- tentara Belanda cukuplah besar dibandingkan dengan korban di pihak KDM Kabupaten Lamongan sendiri, yakni korban tewas tercatat 139 orang, luka-luka 29 orang dan tertawan 11 orang. Sedangkan selama Agresi Militer Belanda II di Kabupaten Lamongan, korban dari pihak RI sampai dengan tanggal 19 Juni 1949, tercatat tentara: gugur sebanyak 40 orang, luka-luka 12 orang dan tertawan 11 orang. Penduduk: tewas sebanyak 355 orang, luka-luka 93 orang. Harta benda: rumah yang dibakar sebanyak 1.070 buah, ternak 178 ekor, padi 840 kwintal, perhiasan seharga Rp. 1.480.100,- dan lain-lain seharga Rp.3.915.022,- (Husain, 2016).

Peristiwa pengakuan Indonesia secara internasional tidaklah didapat dengan harga yang murah dan mudah, segala pengorbanan– pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan atas nama “Kemerdekaan”, harus dibayar sangat mahal dan tak tergantikan. Banyak nyawa pejuang dan korban perang yang harus melayang demi kemerdekaan Indonesia, banyak rakyat yang kehilangan tempat tinggal karena rusak poranda akibat dibakar serdadu- serdadu Belanda maupun dalam usaha bumi hangus, dan masih banyak lagi kerugian– kerugian lainnya yang dirasakan oleh para pejuang RI dan rakyat Indonesia akibat dari pecahnya perang kemerdekaan. Sarana dan prasarana fasilitas negara rusak atau hancur luluh lantah, hingga hilang diambil musuh. Setelah pengakuan pemerintah Belanda kepada RI, Kabupaten Lamongan resmi menjadi salah satu bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam perkembangannya, setiap peristiwa pada masa revolusi fisik diapresiasi oleh pemerintah dengan dibangunkannya tugu,

monumen dan patung, dijadikan nama jalan, gedung atau sebuah organisasi, yang semuanya bertujuan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya.

4. Kesimpulan

Keberhasilan Kabupaten Lamongan selamat dari pendudukan pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I, tidak terlepas dari tujuan Belanda yang hanya mengincar daerah- daerah strategis, seperti pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah, Karesidenan Besuki di Jawa Timur, perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur dan lain-lain. Pada Agresi Militer Belanda II, tujuan Belanda semakin meluas, dengan menyerang dan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Lamongan. Setelah terjadi persetujuan Renville (17 Januari 1948), RI hanya memiliki luas wilayah 1/3 di Pulau Jawa, sehingga tujuan pasukan Belanda untuk menguasai seluruh wilayah RI di Pulau Jawa bisa dipastikan hampir tercapai, dengan strategi yang telah matang, tentara yang terlatih dan berpengalaman serta diimbangi dengan persenjataan yang lebih lengkap dan canggih. Mustahil bagi RI untuk bisa bertahan dari gempuran pasukan Belanda, namun tentara dan rakyat menolak menyerah kepada Belanda sebelum berjuang dan lebih memilih untuk mengangkat senjatanya melawan serdadu- serdadu Belanda demi mempertahankan kemerdekaan di wilayah-wilayah RI, termasuk di Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan yang belum berhasil dikuasai pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I menjadi sasaran pendudukan selanjutnya pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda II, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Surabaya yang telah menjadi wilayah kekuasaan pasukan Belanda dan juga berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pusat pemerintahan Karesidenan Bojonegoro. Sehingga dengan menguasai Kabupaten Lamongan, wilayah-wilayah lain di Karesidenan Bojonegoro yang berdekatan dengan Kota Surabaya, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang, akan dengan mudah dikuasai oleh serdadu-serdadu Belanda. Penguasaan Kabupaten Lamongan juga akan memperlancar akses bantuan-bantuan dari Kota Surabaya melalui jalur darat, mempermudah komunikasi antar kota yang telah dikuasai dan dapat memperoleh sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu, wilayah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki sumber daya alam (minyak) yang cukup melimpah yang terdapat di wilayah Cepu,

sehingga dengan menguasai Kabupaten Lamongan akan mempermudah pasukan Belanda untuk menguasai daerah-daerah tersebut dan berguna untuk membantu pasukan Belanda dalam pertempuran-pertempuran berikutnya.

Pada masa revolusi fisik atau perang kemerdekaan, Kabupaten Lamongan dijuluki sebagai “Kota Garis Depan” oleh para pejuang RI, karena di wilayah Kabupaten Lamongan sering sekali terjadi pertempuran-pertempuran yang melibatkan pasukan republik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Sekutu dan pasukan Belanda, daripada wilayah lainnya di Karesidenan Bojonegoro. Pasca Kota Lamongan berhasil dikuasai pasukan Belanda pada tanggal 18 Januari 1949, maka pasukan RI mulai menerapkan strategi yang telah diracik Panglima Besar Jenderal Sudirman yakni *Winggate* (menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong yang telah tertulis dalam perintah siasat no.1. *Winggate* adalah aksi untuk melakukan penyusupan ke daerah kantong-kantong Belanda, melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda, penghadangan patroli dengan menghindari kekuatan tentara Belanda yang berjumlah besar melalui aksi gerilya. Menggunakan seluruh potensi nasional yang dimiliki, yakni keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dan segenap sumber daya nasional yang dimiliki, baik sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Agresi militer Belanda kedua memberikan pengalaman berarti untuk pasukan Belanda, karena dalam peristiwa tersebut mereka harus menghadapi suatu gerakan perjuangan total yang terorganisir dan tersistem melibatkan tentara, laskar, pelajar, aparatur negara, pemuda terlatih, badan-badan perjuangan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan yang disebut sebagai sistem pertahanan rakyat semesta.

Sistem ini menyebabkan serdadu- serdadu Belanda dipaksa bertahan dan hanya mampu menguasai kota-kota di sebagian kecil dari wilayah RI, sedangkan wilayah pedalaman dan keseluruhan masih dalam penguasaan pasukan RI. Terciptalah beberapa peristiwa- peristiwa heroik bersejarah yang terjadi dalam usaha mempertahankan keutuhan, kedaulatan dan kesucian kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Lamongan, seperti pertempuran di Desa Kentong yang melibatkan Batalyon Sunaryadi, peristiwa kakat penjalin Seksi I Nurcahyo dan Seksi II Ronggodihar dari Brigade XXX/Ronggolawe, pertempuran di ujung jalan Desa Plosobuden Seksi I Letnan Muntalib Kompi Kardomo Batalyon Sunaryadi, pertempuran di Kedungpring pasukan Mobrig

polisi Karesidenan Bojonegoro Sugeng Suprobo, pertempuran di Gumantuk Regu I Kadet Suwoko pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, pertempuran di Lapangan Desa Palang Regu VI Sersan Nurali pasukan tamtama KDM Kabupaten Lamongan, dan pertempuran-pertempuran para pejuang RI lainnya di Kabupaten Lamongan pada masa revolusi fisik.

Pada akhirnya segala usaha, pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan dan dikorbankan para pejuang republik terbayarkan dengan adanya pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh dunia internasional dan Pemerintah Negara Belanda. Peristiwa bersejarah pada tanggal 19 Desember 1949, yakni pengakuan kedaulatan NKRI yang akan menciptakan suatu tatanan dan problematika baru dalam perjalanan bangsa Indonesia kedepannya. Selama Agresi Militer Belanda II di Kabupaten Lamongan, korban dari pihak RI sampai dengan tanggal 19 Juni 1949, tercatat sebagai berikut:

- a. Tentara: gugur sebanyak 40 orang, luka-luka 12 orang dan tertawan 11 orang.
- b. Penduduk: tewas sebanyak 355 orang, luka- luka 93 orang.
- c. Harta benda: rumah yang dibakar sebanyak 1.070 buah, ternak 178 ekor, padi 840 kwintal, perhiasan seharga Rp. 1.480.100,- dan lain-lain seharga Rp.3.915.022,-.

Selama enam bulan pertempuran melawan pasukan Belanda, menurut catatan KDM Kabupaten Lamongan bagian penyiaran, korban dari pihak tentara-tentara Belanda cukuplah besar dibandingkan dengan korban di pihak KDM Kabupaten Lamongan sendiri, yakni korban tewas tercatat 139 orang, luka-luka 29 orang dan tertawan 11 orang. Dalam perkembangannya, setiap peristiwa pada masa revolusi fisik diapresiasi oleh pemerintah dengan dibangunkannya tugu, monumen dan patung, dijadikan nama jalan, gedung atau sebuah organisasi, yang semuanya bertujuan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya.

Daftar Pustaka

1. Arsip

Cuplikan Sejarah Agresi Belanda II (Klasch II) Tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 1949 Kabupaten Lamongan Jawa Timur, dalam koleksi Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Lamongan.
“Suasana peringatan pekik merdeka”, Kementerian Pertahanan No.105, dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

2. Buku

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Biro Pusat Statistik Lamongan, *Statistik Kabupaten Lamongan Tahun 1979-1980*. Lamongan: Kantor Statistik Kabupaten Lamongan, 1980.
- Chambali, Achmad, *Menelusuri Sejarah Kabupaten Lamongan*. Majelis Taklim Islamiyah: Lamongan, 2006.
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press, 2009.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, *Revolusi Nasional Tingkat Lokal*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989.
- Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia–Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*. Bandung-Jakarta: Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia –Angkatan Darat dan Fa. Mahjuma, 1972.
- El-Kayyis, Isno, *Perjuangan Laskar Hizbullah Di Jawa Timur*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1975.
- Gunawan, Restu dan G.A. Ohorella, *Sejarah Lokal: Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Hayat, Sholeh, *Kyai Dan Santri Dalam Perang Kemerdekaan*. Surabaya: Pimpinan Wilayah Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 2016.
- Husain, Sarkawi B. *et.all.*, *Sejarah Lamongan Dari Masa Ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993.
- Kartomihardjo, Prayoga, Prpto Saptono dan Soekarsono, *Monumen Perjuangan Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1986.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Moehkardi, *Pendidikan Perwira TNI-AD Di Masa Revolusi Jilid I*. Jakarta: PT. Inaltu, 1979.
- Moentalip, *Memori Perjuangan Pahlawan Kadet Soewoko*. Lamongan: Panitia Pembangunan Monumen Memori Lamongan, 1975.

- Nasution, Abdul Haris, *Pokok-Pokok Gerilya Dan Pertahanan Republik Indonesia Di Masa Lalu Dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Prabowo, J. Suryo, *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, 2009.
- Pramono, *et.all.*, *Badan-Badan Perjuangan*. Jakarta: Departemen Pertahanan- Keamanan Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1983.
- Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia, 2000.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Sapto, Ari, *Republik Dalam Pusaran Elite Sipil Dan Militer*. Yogyakarta: Matapadi, Ronggolawe. Jakarta: Aries Lima, 1985.
- Sasmita, Nurhadi, *et.all.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. 2018.
- Tim Penyusun Naskah Buku, *Dharma Bhakti Pejuang Kepada Bangsa Dan Negara Pada Revolusi Fisik Tahun 1945-1950 Di Kabupaten Lamongan*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.
- Sjamsudduha, *et.all.*, *Lamongan Memayu Raharjaning Praja*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, 1994.
- Soejono, R.P. dan R.Z. Leirissa, *Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia ±1942-1998) Edisi Pemuktakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Soewito, Irna H.N. Hadi, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan Jilid 2*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Sudarmo, *et.all.*, *Sejarah Pemerintahan Militer Dan Peran Pamong Praja Di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suherly, Tanu, *Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan- Keamanan, 1971.
- Sukadri, Heru K., Soewarno dan Ny. Umiati RA, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.
- Suryadi, *Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Lamongan: Komando Distrik Militer 0812 Lamongan*, 1992.

Widuatie, Mrr. Ratna Endang, *Jember Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1949: Perjuangan Merebut Dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jember: UPT. Percetakan Dan Penerbitan Universitas Jember, 2018.

3. Koran

“Laporan KTN kepada Dewan Keamanan tentang keadaan militer Lamongan dan Bodjonegoro dihanturkan”, dalam koran *Merdeka*, Selasa, 15 Januari 1949, hal.1 dan 6.

4. Skripsi

Anugrah, Taufan Wirid, *Pembangunan Monumen Perjuangan Kadet Soewoko: Symbolisme Militer Di Kabupaten Lamongan (1972-1976)*, skripsi pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2013.

5. Wawancara

Wawancara dengan Nafsiah, Lamongan, 09 November 2019.